

## ABSTRAK

Dewasa ini perekonomian dunia semakin maju, banyak negara berkembang yang hingga saat ini berusaha meningkatkan taraf perkenomian negara, tak terkecuali Indonesia. Semakin maju perekonomian, semakin banyak pula peluang dan pesaing dalam meluaskan suatu usaha. Di Indonesia permasalahan yang paling mendasar dalam hal perekonomian saat ini salah satunya adalah mengenai persekongkolan tender. KPPU sebagai lembaga pengawas yang mengawasi arus persaingan usaha di Indonesia, berwenang untuk memberikan sanksi dan tindakan administratif kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan persaingan usaha tidak sehat, salah satunya adalah persekongkolan. Persekongkolan ini termasuk dalam klasifikasi tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 karena dapat merugikan keuangan negara. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 mengatur tindakan persekongkolan dapat dijatuhi sanksi administratif dan sanksi pidana. Peraturan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 adalah wewenang khusus yang dimiliki oleh KPPU, termasuk mengenai sanksi pidana. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji sejauh mana batasan dan wewenang KPPU dalam penerapan sanksi pidana terhadap kasus persekongkolan tender yang berimplikasi tindak pidana, dan bagaimana penegakan hukum menurut hukum persaingan usaha.

**Kata Kunci :** Persaingan Usaha Tidak Sehat, Persekongkolan Tender, Sanksi Pidana

### ABSTRACT

Nowadays, the economy is increasingly advanced, many developing countries are currently trying to improve the level of state economy, including Indonesia. The more developed the economy, the more opportunities and competitors in expanding a business. In Indonesia, the most fundamental problem in terms of the economy today is one of them regarding the tender conspiracy. KPPU as an institution that oversees the flow of business competition in Indonesia, has the authority to impose sanctions and administrative actions to business actors who proven to carry out unfair business competition, one of them which is conspiracy. This conspiracy is an act that is prohibited by Law 5/1999 because it can harm the country's finance. The purpose of this paper is to examine the extent and limitations of KPPU's authority in applying criminal sanctions to tender conspiracy cases that have criminal implications, and how to enforce the law according to business competition law.

**Keyword :** Unfair Business Competition, Tender Conspiracy, Criminal Sanctions.